

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Gambaran Umum**

###### **a. Kabupaten Labuhan Batu Utara**

Kabupaten Labuhan Batu Utara merupakan salah satu Kabupaten dari pemekaran Labuhanbatu yang mekar menjadi 3 Kabupaten yaitu: Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pembentukan Kabupaten Labuhan Batu Utara didasarkan pada hal-hal berikut:

- 1) Surat keputusan DPRD Labuhanbatu Utara didasarkan pada tanggal 31 oktober 2005 tentang persetujuan DPRD Labuhanbatu Utara terhadap pembentukan Kabupaten Labuhanbatu, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- 2) Suarat keputusan DPRD Labuhanbatu No.63a Tahun 2005 tanggal 31 oktober 2005 tentang penetapan ibukota Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- 3) Surat keputusan DPRD Labuhanbatu No.63 Tahun 2005 tanggal 31 oktober 2005 tentang kesanggupan dukungan dana dari Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- 4) Keputusan Bupati Labuhanbatu No.135/226/PEM/2005 tanggal 10 Maret 2005 tentang penetapan ibukota Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Labupaten Labuhanbatu Selatan;<sup>1</sup>
- 5) Surat Bupati Labuhanbatu No.135/2698/Pem/2005 Tanggal 1 November 2005 perihal mohon persetujuan pemekaran Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
- 6) Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Utara No. 1/K/2006 tanggal 12 Januari 2006 tentang persetujuan Pemekaran Kabupaten Labuhanbatu Utara;
- 7) Surat Gubernur Sumatera Utara No.903/035.K/2006 Tanggal 26 Januari 2006 Tentang Banguan Dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah provinsi sumatera utara bagi calon Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan;

---

<sup>1</sup> Laporan Akhir RTRW Kabupaten Labuhanbatu Utara, (Aek Kanopan 2011-2031).

- 8) Keputusan DPRD Kabupaten Labuhanbatu No.08 Tahun 2008 Tanggal 5 Mei Tentang Dukungan Dana dalam Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Labuhanbatu (Induk) bagi calon Kabupaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan Di Kabupaten Labuhanbatu;
- 9) Surat Gubernur Sumatera Utara No.135/6191 Tanggal 24 Juni 2008 perihal Bantuan Dana Calon Kabuoaten Labuhanbatu Utara dan Kabupaten Labuhanbatu Selatan.
- 10) Keputusan Bupati Labuhanbatu No.903/452/Pem2007 Tanggal 27 Desember tentang dukungan Dana

Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemerintah telah melakukan pengkajian secara mendalam dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan berkesimpulan bahwa pemerintah perlu membentuk Kabupaten Labuhanbatu Utara. Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara tercantum dalam Undang-Undang RI No.23 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Utara Provinsi Sumatera Utara.

Kabupaten Labuhanbatu Utara memiliki luas wilayah 3.570,98 km yang terdiri dari 8 Kecamatan, 82 Desa dan 8 kelurahan dengan luas area seluas 354.580 Ha; dengan ibukotanya Aek Kanopan yang terletak di Kecamatan Kualuh Hulu. Kecamatan ini berbatasan langsung dengan kabupaten asahan. Adapun mengenai jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan serta jarak dari kota Kabupaten ke Ibukota Kecamatan (IKK) Kabupaten Labuhan Batu Utara adalah sebagai berikut:<sup>2</sup>

**Tabel 4.1**

**Luas Daerah, Jumlah Desa/ Kelurahan dan Jarak ke Ibukota Kabupaten**

No	Kecamatan	Ibu kota kecamatan	Luas (HA)	Jumlah		Jarak ke ibukota kabupaten
				Desa	Kelurahan	
1.	Na 1X-X	Aek kota batu	55.400	12	1	46
2.	Marbau	Marbau	35.590	17	1	66
3.	Aekkuo	Aek Korsik	25.020	8	-	72

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik, Kabupaten Labuhanbatu Utara, (Aek Kanopan 2011-2031).

4.	Aeknatas	Bandar Durian	67.800	11	1	35
5.	Kualuh Selatan	Damuli	34.451	11	1	15
6.	Kualuh Hilir	Kampung Mesjid	38.548	6	1	69
7.	Kualuh Hulu	Aek Kanopan	63.739	11	2	1
8.	Kualuh Leidong	Tanjung Leidong	34.032	6	1	71

Sumber : RTRW Kabupaten Labuhanbatu Utara 2011-2031.<sup>3</sup>

## b. Gambaran Umum Kecamatan Kualuh Hilir

### 1. Sejarah Kecamatan Kualuh Hilir Kecamatan Kualuh Hilir

Kecamatan Kualuh Hilir adalah salah satu daerah yang dijajah oleh kubu belanda pada tanggal 5 juni tahun 1949 pada waktu terjadinya sebuah peperangan di Kecamatan Kualuh Hilir. Kecamatan Kualuh Hilir menempati luas area 385,48 Km yang terdiri dari 7 desa dan 1 keluarahan. Wilayah Kecamatan Kualuh Hilir disebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Aek Kuo disebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Labuhan Batu Utara, dan di sebelah selatan dengan Kualuh Hulu.

**Tabel 4.2**

**Luas Wilayah Menurut Kecamatan Di Kualuh Hilir**

Desa/Kelurahan	Luas (Km2)	Rasio Terhadap Total (%)
Kuala Bangka	111,90	29,03
Teluk Binjai	62,40	16,19
Sugai Sentang	30,10	7,81
Sungai Apung	47,431	12,30
Kampung Mesjid	20,22	5,25
Teluk Piai	28,44	7,38
Tanjung Mangedar	84,99	22,05

<sup>3</sup> Badan Pusat Statistik, Kabupaten Labuhanbatu Utara, (Aek Kanopan 2011-2031).

<b>Jumlah</b>	<b>385,481</b>	<b>100,01</b>
---------------	----------------	---------------

Sumber : BPS Kabupaten Labuhanbatu Utara, 2021.<sup>4</sup>

### c. Gambaran Umum Desa Teluk Piai

#### 1. Sejarah Desa Teluk Piai

Desa Teluk Piai merupakan salah satu desa yang berada di Kabupaten Labuhan Batu Utara tepatnya di Kecamatan Kualuh Hilir. Desa Teluk Piai ini merupakan desa kedua penghujung Kabupaten Labuhan Batu Utara sebelum Desa Tanjung mangedar. Luas wilayah Desa Teluk Piai ini mencapai  $\pm$  23.800 Ha, sebelah utara Desa Teluk Piai berbatasan dengan Desa Tanjung Mangedar, sebelah selatan berbatasan dengan Desa Penggantungan Labuhan Batu Induk, dan sebelah timur berbatasan dengan kelurahan Kampung Masjid, dan sebelah barat berbatasan dengan Desa Sei Apung/ Sungai Kualuh.

Adapun pejabat Kepala Desa Teluk Piai sekarang adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa Bapak Khairuddin
- 2) Sekretaris Desa Bapak Irhamuddin Siregar, S.P

#### 2. Letak Geografis

Desa Teluk Piai memiliki batas wilayah sebagai berikut:

- 1) Sebelah utara: berbatasan dengan
- 2) Sebelah timur: berbatasan dengan
- 3) Sebelah selatan: berbatasan dengan
- 4) Sebelah barat: berbatasan dengan

Desa Teluk Piai memiliki jarak tempuh ke ibu kota kecamatan terdekat yaitu Kecamatan Kualuh Hilir sekitar 3 Km, lama jarak tempuh ke ibu kota Kecamatan Kualuh Hilir sekitar 20-25 menit. Jarak ke ibu kota Kabupaten Labuhan Batu Utara yaitu sekitar 4 jam<sup>5</sup>

<sup>4</sup> Badan Pusat Statistik, Kabupaten Labuhanbatu Utara, (Aek Kanopan 2021).

<sup>5</sup> Badan Pusat Statistik, Kabupaten Labuhanbatu Utara, (Aek Kanopan 2021).

### 3. Letak Demografi

Luas wilayah Desa Teluk Piai adalah Ha, terdiri dari:

**Tabel 4.3**

**Luas wilayah Desa Teluk Piai**

No.	Wilayah	Luas
1.	Permukiman	365.5 ha
2.	Pertanian/Perkebunan	287.1 ha
3.	Hutan	100,7 ha
4.	Rawa-rawa	50 ha
5.	Perkantoran	0,2 ha
6.	Sungai	182,75 ha
7.	Lapangan sepak bola	2 ha
8.	Sekolah	2,6 ha

### 4. Kependuduk Desa Teluk Piai

Penduduk Desa Teluk Piai sebanyak 3.823 jiwa yang terdiri dari 929 KK, laki-laki sebanyak 1.913 jiwa dan perempuan sebanyak 1.810 jiwa. Jumlah penduduk yang terbanyak terdapat di dusun Sei Bauwe yaitu sekitar 148 KK, sedangkan yang paling sedikit berada di dusun Teluk Piai Tengah yaitu sekitar 52 KK. Sebagian besar penduduk di Desa Teluk Piai beragama islam yaitu sebanyak 85%, sedangkan yang beragama Kristen Protestan sebanyak 15% dan Hindu Budha 0%.

**Tabel 4.4**

**Jumlah Dan Kependudukan Desa Teluk Piai**

No.	Nama Dusun	Jumlah Penduduk		Jumlah KK
		Lk	Pr	
1.	Dusun Teluk Piai Hulu	212	206	119
2.	Dusun Tanjung Tiram	201	200	101
3.	Dusun Sei Bauwe	304	300	148
4.	Dusun Teluk Piai Tengah	110	97	52
5.	Dusun Langgeng Sari	221	236	113
6.	Dusun Darussalam	234	216	103
7.	Dusun Sialangatap	195	124	88

8.	Dusun Jati Sari	228	225	108
9.	Dusun Terusan	208	206	97
Jumlah		1.913	1.810	929

Sumber : Kantor Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara.

## 5. Kondisi Sosial di Desa Teluk Piai

### 1) Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hal yang sangat penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya. Dengan tingkat pendidikan yang tinggi menjadi salah satu indikator dalam merubah pola pikir generasi muda dalam menghadapi masa depan yang lebih cemerlang. Dengan pendidikan tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan masyarakat dalam berpikir, keterampilan dalam kewirausahaan dan menciptakan lapangan pekerjaan. Dengan pendidikan kita bukan saja untuk mencari kerja tetapi juga diharapkan dapat menciptakan lapangan pekerjaan dengan pola pikir dan kesiapan yang luas. Dan dengan begitu juga pasti akan membantu berjalannya program pemerintah dalam mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Adapun kelompok pendidikan penduduk di Desa Teluk Piai adalah sebagai berikut:

**Tabel 4.5**  
**Pendidikan di Desa Teluk Piai**

No.	Nama Pendidikan	Lk	Pr
1.	TK	147	156
2.	SD/MI	223	216
3.	SMP/MTs	116	125
4.	SMA/SMK/MA	110	103
5.	S1/D3	15	30

## 6. Sumber Mata Pencaharian di Desa Teluk Piai

Masyarakat Desa Teluk Piai memiliki Mata Pencaharian seperti:

**Tabel 4.6**  
**Sumber Mata Pencaharian Masyarakat di Desa Teluk Piai**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1.	Petani	50%

2.	Nelayan	25%
3.	Guru/PNS	10%
4.	Bidan/Perawat/Dokter	10%
5.	Pensiunan	5%
6.	Pedagang	25%
7.	Buruh	15%

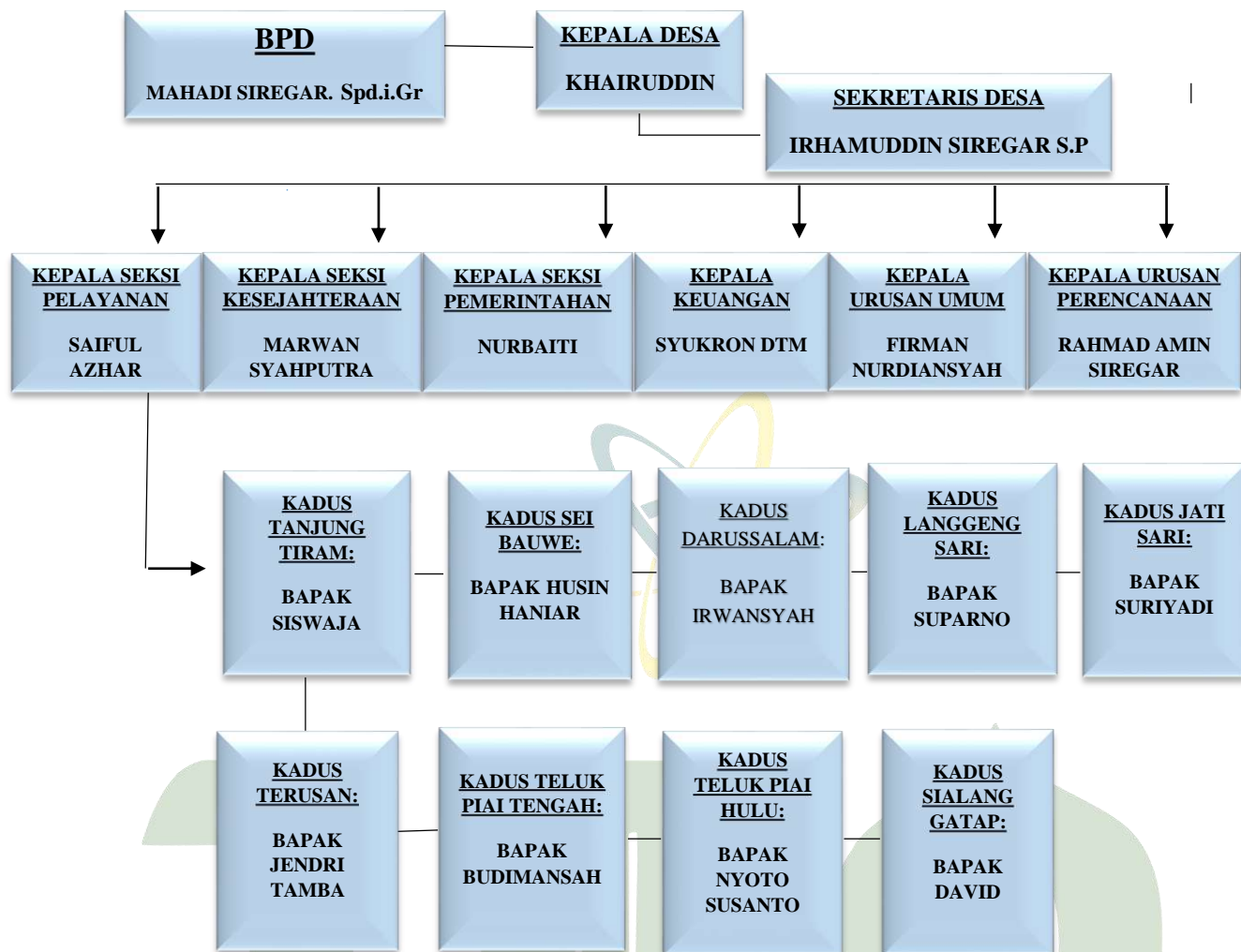
Dari Mata Pencarian masyarakat di Desa Teluk Piai tersebut ditunjang dari bidang Pertanian dan Perdagangan, yaitu sebagai berikut:

**Tabel 4.7**  
**Mata Pencarian Masyarakat**  
**Bidang Pertanian dan Perdagangan di Desa Teluk Piai**

No.	Pertanian	Perdagangan
1.	Padi	Warung Kopi
2.	Sawit	Kedai Sembako/grosir
3.	Kelapa	Online Shop/Offline Shop
4.	Sayuran	Toko Pakaian/Toko perabotan
5.	Buah-buahan	Warung Bakso/Makanan lain sebagainya
6.	Dan lain-lain	Dan lain-lain

## 7. Struktur Pemerintahan Desa Teluk Piai

Dalam setiap pemerintahan yang baik, harus ada pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab, agar setiap tugas baik pemimpin maupun pekerja dapat mengetahui dengan jelas yang menjadi tugasnya. Dengan adanya pembagian tugas, kemudahan dalam melakukan pekerjaan sehari-hari sehingga terjadi koordinasi antara petugas satu dengan yang lainnya akan terlaksana dengan baik. Penentuan tugas dan tanggung jawab ini dapat diketahui melalui struktur organisasi. Berikut stuktur pemerintahan Desa Teluk Piai:



## 2. Hasil Uji Analisis

### a. Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara

Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa adalah suatu upaya, proses, cara dan perbuatan untuk menggunakan sumber-sumber yang dimiliki dalam rangka mencapai kondisi yang terbaik, paling menguntungkan dan paling diinginkan dalam batas-batas tertentu dan kriteria tertentu dalam melakukan pengelolaan Dana Desa. Pemerintah desa merupakan pemegang kendali dalam pembangunan desa, oleh karena itu kepala desa beserta perangkatnya merupakan penanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan dan roda pembangunan sehingga maju mundurnya pembangunan di suatu desa tergantung dari kinerja pemerintah desa dalam mempengaruhi masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunannya. Efektivitas pembangunan dalam mengatasi berbagai permasalahan untuk merespon kebutuhan dan menjawab tantangan perkembangan



masyarakat ditentukan sejauh mana proses pembangunan dapat meningkatkan kapasitas dan mencapai kemandirian dan kesejahteraan.

Di Desa Teluk Piai ini terdapat potensi sumber daya yang ada. Seperti Sumber Daya Alam, Sumber Daya Lingkungan Dan Sumber Daya Manusia. Agar terpenuhinya kebutuhan maka mau tidak mau sumber daya yang sudah ada tersebut harus di manfaatkan dengan baik. Untuk itu perlu adanya pengoptimalisasian pengelolaan Dana Desa khususnya untuk pembangunan sebab pembangunan desa mencakup berbagai bidang kehidupan masyarakat baik itu lahir maupun batin. Semua yang terkait dengan pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di haharapkan selalu mengetahui permasalahan dan kebutuhan masyarakatnya. Maka dalam hal ini kepala desa harus menempatkan diri sebagai pemimpin yang baik yang bisa mengayomi masyarakat dan siap mendengarkan segala keluh kesah warga dalam hal apapun agar warga benar-benar percaya bahwa pemimpinnya selalu bersikap adil dan tidak berpihak pada yang satu atau yang lainnya.

Sebagaimana yang diketahui bahwa tujuan pemberian Dana Desa adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan penyelenggaraan pemerintah desa dalam melaksanakan pelayanan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kewenangannya.
- b. Meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta partisipasi sesuai dengan kemampuan yang dimiliki.
- c. Meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat dalam rangka mengembangkan ekonomi masyarakat.
- d. Mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat.

Dari uraian diatas maka dapat dipisahkan antara tujuan yang diharapkan langsung dapat tercapai, yaitu meningkatnya penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan, meningkatkan kemampuan lembaga kemasyarakatan di desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan serta mendorong peningkatan partisipasi swadaya gotong-royong masyarakat, sedangkan tujuan tidak langsung adalah meningkatkan pemerataan pendapatan, kesempatan kerja dan kesempatan berusaha bagi masyarakat dalam rangka mengembangkan ekonomi

masyarakat. Dalam pencapaian tujuan terkait dengan penyelenggaraan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan terdapat pernyataan yang berbeda antara informan satu dengan yang lainnya.

Berdasarkan wawancara yang telah dilaksanakan dengan kepala desa teluk piai yaitu Bapak Khairuddin mengenai optimalisasi pengelolaan Dana Desa ia mengatakan sudah dilaksanakan sesuai RKP (Rencana Kerja Pemerintah). Berikut pernyataannya:

Mengenai masalah pengelolaan Dana Desa di desa teluk piai ini Alhamdulillah cukup membaik dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya. Baik itu pembangunan fisik maupun non fisik dan saya selalu berusaha agar dalam pengelolaan Dana Desa khususnya pelaksanaan pembangunan lebih baik lagi tidak hanya itu saja, saya dan para apatur desa lainnya selalu berupaya untuk meningkatkan pelayanan yang baik kepada warga. Diliat dari segi pembangunan di Desa Teluk Piai sekarang ini sudah ada beberapa program pembangunan yang sudah terlaksana seperti pengerasan jalan di setiap dusun dan membangun jembatan di beberapa dusun. Mengingat kondisi desa teluk piai yang pendapatan aslinya sangat rendah dengan adanya Alokasi Dana Desa saya dan perangkat desa lainnya selalu berusaha untuk mengarahkan dan melakukan pengelolaan Dana Desa kearah yang lebih optimal dan ke arah yang semestinya digunakan terutama dalam menyukseskan program pembangunan agar terlaksana dengan baik dengan tujuan untuk mempermudah aktivitas masyarakat di Desa Teluk Piai ini.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari Kepala Desa Teluk Piai yaitu Bapak Khairuddin beliau menyatakan:

Pelaksanaan atau Penerapan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan peraturan dan sesuai RKP (Rencana Kerja Pemerintah). Tapi masih ada yang diperaturan Permendagri No.113 Tahun 2014 belum semua dapat dilaksanakan seperti Bumdes (Badan Usaha Milik Desa). Kami hanya melaksanakan yang lebih prioritas dan yang dibutuhkan masyarakat di Desa Teluk Piai ini”.

Dari pernyataan Bapak Kepala Desa Teluk Piai di atas bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa belum sesuai dengan Permendagri No.113 & 114 Tahun 2014 karena Bumdes (Badan Usaha Milik Desa) belum dilaksanakan. Dengan begitu penerapan pengelolaan Dana Desa dapat di katakan belum optimal karena belum sesuai Permendagri No.113 Tahun 2014 & 114 Tahun 2014.

Selanjutnya tentang pembangunan infrastruktur Desa Teluk Piai, pembangunannya masih minim dan jauh dari kata optimal. Sesuai dengan pernyataan Kepala Desa Teluk Piai yaitu Bapak Khairuddin *“Pembangunan infrastuktur di Desa Teluk Piai masih belum optimal, seluruh jalan di Desa Teluk Piai sampai menuju Kelurahan bahkan seluruh jalan di Kecamatan Kualuh Hilir menuju kabupaten masih belum diaspal, tetapi hal ini sudah mendapat perhatian dari Bupati kita tunggu saja bagaimana hasilnya”*.

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa pengelolaan Dana Desa di desa teluk piai dari tahun ke tahun sudah membaik dan sudah dilakukan pengerasan jalan di beberapa dusun dan Pelaksanaan atau Penerapan Alokasi Dana Desa sudah sesuai dengan peraturan dan sesuai RKP (Rencana Kerja Pemerintah. Tetapi masih ada yang diperaturan Permendagri No.113 Tahun 2014 belum semua dapat dilaksanakan seperti Bumdes (Badan Usaha Milik Desa). Karena pemerintah hanya melaksanakan yang lebih prioritas dan yang dibutuhkan masyarakat di Desa Teluk Piai ini yaitu untuk pembangunan jalan.

#### **b. Pengelolaan Dana Desa di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara**

Untuk meminimalisir atau mencegah terjadinya penyalahgunaan Dana Desa ini maka pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Utara menetapkan peraturan dan pengelolaan yang harus ditaati oleh setiap pengelola ADD di setiap desa, yaitu sebagai berikut:

- a. Pengelolaan ADD dilakukan oleh Kepala Desa yang dituangkan kedalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.
- b. Pengelolaan keuangan ADD merupakan bagian tidak terpisahkan dari anggaran pendapatan dan belanja desa beserta lampirannya.
- c. Seluruh kegiatan yang didanai oleh ADD harus direncanakan.
- d. ADD dilaksanakan dengan menggunakan prinsip efisien dan efektif, terarah, terkendali serta akuntabel dan bertanggungjawab.
- e. Bupati melakukan Pembinaan Pengelolaan Keuangan Desa.
- f. ADD merupakan salah satu sumber pendapatan Desa.
- g. Pengelolaan Alokasi Dana Desa dilakukan oleh Pemerintah Desa yang dibantu oleh lembaga kemasyarakatan di desa.

Bupati Kabupaten Labuhanbatu Utara Bapak Hendrianto Sitorus S.E, menyampaikan bahwa pemerintah agar mudah dalam mengelola Dana Desa harus benar-benar sesuai prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.

**Tabel 4.8**

**Program Alokasi Dana Desa Di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir  
Kabupaten Labuhanbatu Utara**

<b>Program Pembangunan Tahun 2018</b>				
<b>No.</b>	<b>Nama Program</b>	<b>Lokasi</b>	<b>Pemanfaat</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Pengerasan Jalan Pitrun	Dusun Teluk Piai Hulu	Masyarakat	Rp.80.000.000
2.	Pengerasan Jalan Pitrun	Dusun Tanjung Tiram	Masyarakat	Rp. 73.350.000
3.	Peningkatan Rawat Beton, Tembok Penahan & Gorong-Gorong	Dusun Sei Bauwe	Masyarakat	Rp.69.450.000
4.	Pengerasan Jalan Pitrun	Dusun Sei Bauwe	Masyarakat	Rp. 75.370.000
5.	Pengerasan Jalan Pitrun	Dusun Teluk Piai Tengah	Masyarakat	Rp. 79.777.000
6.	Peningkatan Rawat Beton, Tembok Penahan & Gorong-Gorong	Dusun Langgeng Sari	Masyarakat	Rp. 74.200.000
7.	Pengerasaan Jalan Pitrun	Dusun Darussalam	Masyarakat	Rp.71.500.000
8.	Peningkatan Rawat Beton, Tembok Penahan & Gorong-Gorong	Dusun Jati Sari	Masyarakat	Rp. 70.000.000
9.	Pengerasaan Jalan Pitrun	Dusun Terusan	Masyarakat	Rp. 73.000.000
		<b>Jumlah</b>		<b>Rp. 666.647.000</b>

<b>Program Pembangunan 2019</b>				
<b>No.</b>	<b>Nama Program</b>	<b>Alokasi</b>	<b>Pemanfaat</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Pengerasan Jalan Pitrun	Dusun Teluk Piai Hulu	Masyarakat	Rp.81.000.000 <sup>6</sup>
2.	Pengerasaan Jalan Pitrun	Dusun Tanjung Tiram	Masyarakat	Rp. 74.360.000
3.	Pengerasan Rawat Beton & Gorong-Gorong	Dusun Sei Bauwe	Masyarakat	Rp. 70.450.000
4.	Pengerasan Jalan Pitrun	Dusun Teluk Piai Tengah	Masyarakat	Rp. 76.370.000
5.	Pengerasan Jalan Pitrun	Langgeng Sari	Masyarakat	Rp. 80.750.000
6.	Pengerasan Jalan Pitrun	Dusun Darussalam	Masyarakat	Rp. 75.350.000
7.	Pengerasan Rawat Beton & Gotong-Gorong	Dusun Sialang Gatap	Masyarakat	Rp. 72.000.000
8.	Pengerasaan Jalan Pitrun	Dusun Jati Sari	Masyarakat	Rp. 71.500.000
9.	Pengerasaan Jalan Pitrun	Dusun Terusan	Masyarakat	Rp.74.500.000
	<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 675.680.000</b>
<b>Program Pembangunan Tahun 2020</b>				
<b>No.</b>	<b>Nama Program</b>	<b>Alokasi</b>	<b>Pemanfaat</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Peningkatan Rawat Beton, Tembok Penahan & Gorong-Gorong	Dusun Teluk Piai Hulu	Masyarakat	Rp.82.00.000
2.	Pengerasaan Jalan Pitrun	Dusun Tanjung Tiram	Masyarakat	Rp.75.500.000

<sup>6</sup> Kantor Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara 2018-2021

3.	Pengerasaan Jalan Pitrun	Dusun Sei Bauwe	Masyarakat	Rp.71.280.000
4.	Pengerasaan Jalan Pitrun	Dusun Teluk Piai Tengah	Masyarakat	Rp.77.370.000
5.	Peningkatan Rawat Beton, Tembok Penahan & Gorong-Gorong	Langgeng Sari	Masyarakat	Rp.81.000.000
6.	Pengerasaan Jalan Pitrun	Dusun Darussalam	Masyarakat	Rp.75.300.000
7.	Pengerasaan Jalan Pitrun	Dusun Sialang Gatap	Masyarakat	Rp.73.210.000
8.	Pengerasaan Jalan Pitrun	Dusun Jati Sari	Masyarakat	Rp.72.000.000
9.	Pengerasaan Jalan Pitrun	Dusun Terusan	Masyarakat	Rp.75.340.000
<b>Jumlah</b>				<b>Rp. 683.000.000</b>

**Program Pembangunan Tahun 2021**

No.	Nama Program	Alokasi	Pemanfaat	Jumlah
1.	Peningkatan Rawat Beton, Tembok Penahan & Gorong-Gorong	Dusun Teluk Piai Hulu	Masyarakat	Rp.83.370.000
2.	Pengerasaan Jalan Pitrun	Dusun Tanjung Tiram	Masyarakat	Rp.76.300.000
3.	Pengerasaan Jalan Pitrun	Dusun Sei Bauwe	Masyarakat	Rp.72.570.000
4.	Pengerasaan Jalan Pitrun	Dusun Teluk Piai Tengah	masyarakat	Rp. 78.650.000
5.	Pengerasaan Jalan Pitrun	Dusun Langgeng Sari	Masyarakat	Rp.82.000.000
6.	Peningkatan Rawat Beton, Tembok	Dusun Darussalam	Masyarakat	Rp.76.380.000

	Penahan & Gorong-Gorong			
7.	Pengerasaan Jalan Pitrun	Dusun Sialang Gatap	Masyarakat	Rp.74.501.000
8.	Peningkatan Rawat Beton, Tembok Penahan & Gorong-Gorong	Dusun Jati Sari	Masyarakat	Rp.73.370.000
9	Pengerasaan Jalan Pitrun	Dusun Terusan	Masyarakat	Rp.76.309.000
	<b>Jumlah</b>			<b>Rp. 693.300.000</b>

Sumber Data : Kantor Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara 2018-2021.

Dalam melakukan program pembangunan baik itu pembangunan fisik maupun Non fisik Kepala Desa bekerja sama dengan perangkat desa serta masyarakat, ini merupakan cerminan semangat bersama, rasa kebersamaan dan kesediaan berkorban untuk keberhasilan pembangunan yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat Desa Teluk Piai. Hal ini sesuai dengan wawancara yang disampaikan oleh Bapak Irhamuddin Siregar, S.P selaku Sekretaris Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pertanyaannya sebagai berikut: Bagaimana kemampuan kepala desa dalam memimpin penyaluran Dana Desa khususnya untuk pembangunan jalan dan pelaksanaan program-program lainnya?

Berdasarkan apa yang saya lihat selama ini kemampuan kepala desa dalam melaksanakan tugasnya sudah cukup baik karena sudah ada beberapa program dalam bidang pembangunan yang terselesaikan tetapi ada juga program-program yang belum terlaksana sekarang ini di Desa Teluk Piai, Selain itu desa teluk piai juga memberikan tantangan buat kami dalam penyelenggaraan pemerintah yang berbasis pembangunan tetapi karena adanya kerja sama yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat hal itulah yang membuat kami semangat dalam menghadapi tantangan dalam pembangunan-pembangunan ini.

Kesimpulan yang dapat penulis ambil dari wawancara ini yaitu menunjukkan bahwa pemerintah Desa Teluk Piai perangkatnya, serta masyarakat menjalin hubungan baik dan selalu bekerja sama dalam menjalankan tugas-tugasnya. Dari pernyataan

diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa pemerintah Desa Teluk Piai telah melakukan kerja sama baik kepala desa, perangkat desa dan masyarakat desa untuk meningkatkan pembangunan Desa Teluk Piai yang tujuannya untuk kesejahteraan masyarakat Desa Teluk Piai baik dalam bentuk fisik maupun non fisik walaupun tidak semuanya dapat terealisasikan.

**c. Kepuasan Masyarakat Di Desa Teluk Piai Terhadap Kinerja Aparatur Desa Dalam Pengelolaan Dana Desa.**

Hasil analisis Dana Desa terhadap kepuasan masyarakat adalah keberhasilan pengelolaan Dana Desa yang di lakukan oleh aparatur desa dengan menjalankan berdasarkan prinsip Transparansi, Akuntabel, Partisipasif, Serta Tertib dan Disiplin Anggaran.

Pengelolaan Dana Desa terhadap kepuasan masyarakat Di Desa Teluk Piai sudah dilakukan dengan baik yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan adanya pemerataan dalam pembangunan yang dilaksanakan di desa dengan pelayanan kepada publik yang meningkat, perekonomian desa yang maju serta mengurangi kesenjangan pembangunan antar dusun, pembangunan desa sudah cukup efektif dengan terealisasikannya pembangunan disetiap dusun untuk masyarakat yang meningkatkan kesejahteraan.

Namun hal ini sangat bertolak belakang dengan pernyataan Bapak Rusdi salah satu warga Desa Teluk Piai yang penulis wawancarai pada saat penelitian, beliau mengatakan:

Pengelolaan Dana Desa yang dilakukan oleh kepala desa serta aparatur desa lainnya dari dulu sampai sekarang belum optimal, jika ditanya tentang kepuasan masyarakat tentang kinerja aparatur desa dalam pengelolaan dan pengalokasian Dana Desa saya pribadi belum merasa puas, karena saya melihat tidak adanya transfaransi yang dilakukan oleh aparatur desa dalam pengalokasian Dana Desa. Kami masyarakat dari tahun ke tahun hanya mengharapkan pembangunan jalan di desa teluk piai itu dilakukan, benar adanya sebagian Dana Desa direalisasikan kepada pembangunan jalan itupun sangat minim karena dari dulu sampai sekarang jalan di Desa Teluk Piai masih memprihatinkan, sangat ketinggalan jauh dengan Desa-desa lainnya yang berada di Kabupaten Labuhan Batu Utara.



Lanjut dengan pernyataan Bapak Abduh S.Ag salah satu warga di Desa Teluk Piai pada saat penulis wawancara, berikut pernyataannya:

Kalau di tanya tentang kepuasan masyarakat terhadap kinerja aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa saya masih kurang puas karena saya tidak melihat adanya transparansi kepada masyarakat yang di lakukan oleh apatur desa, dan saya rasa juga bukan hanya yang tidak merasa puas terhadap kinerja aparatur desa dalam pengelolaan Dana Desa ini tapi semua warga juga pasti merasakan hal yang sama”.

Di sambut oleh Ibu Jainab Cia salah satu warga dan juga pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa di Desa Teluk Piai, ia membenarkan tentang pernyataan Bapak rusdi di atas, beliau mengatakan:

Bahwa memang benar selama saya menjabat pengalokasian Dana Desa di desa teluk piai itu tidak seluruhnya direalisasikan kepada masyarakat khususnya untuk pembangunan jalan, Dana Desa yang diterima setiap tahunnya dengan jumlah yang bukan sedikit tidak hanya 50% yang direalisasikan untuk pembangunan sarana dan prasana dan 50% dipergunakan untuk perlengkapan kantor seperti pembelian komputer,kursi,meja dan lainnya.

Dari hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan bahwa masyarakat di desa teluk piai belum merasa puas terhadap kinerja aparatur desa dalam Pengelolaan Dana Desa. Karena kurangnya transparansi yang dilakukan aparatur desa dalam pengalokasian Dana Desa sehingga masyarakat masih mempertanyakan kemana dan untuk apa saja Dana Desa itu dipergunakan.

## **B. Pembahasan**

### **1. Optimalisasi Tahap Perencanaan, dan Pengelolaan Dana Desa di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara**

Optimalisasi dapat diartikan sebagai suatu bentuk mengoptimalkan sesuatu hal yang ada ataupun merancang atau membuat sesuatu secara optimal. Optimalisasi adalah hasil yang dicapai sesuai dengan keinginan, jadi optimalisasi merupakan pencapaian hasil sesuai dengan harapan secara efektif dan efisien. Optimalisasi banyak juga diartikan sebagai ukuran dimana semua kebutuhan dapat dipenuhi dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Dalam melaksanakan perencanaan Dana Desa memang pemerintah desa teluk piyai sudah melaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku yaitu diawali dengan melaksanakan musrembang desa, akan tetapi pada saat pemerintah dan masyarakat beremuk dalam penyusunan program kegiatan yang akan berlangsung di tahun berjalan, masyarakat yang hadir justru kurang memberikan masukan mengenai kegiatan pembangunan apa yang mereka perlukan. Dalam tahapannya setelah pemerintah desa memasukkan proposal kepada pemerintah daerah untuk mendapatkan persetujuan bupati, setelah menerima persetujuan maka pemerintah akan menerima baik itu Alokasi Dana Desa maupun Dana Desa. Pada tahap pencairan Alokasi Dana Desa dilaksanakan dalam II (dua tahap). Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh perseratus) tahap II, pada bulan Agustus sebesar 40% (empat puluh perseratus), penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah Ke Rekening Kas Umum Kampung dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Kampung diterima di Rekening Kas Umum Daerah.

Sesuai dengan intruksi dari peraturan Bupati (PERBUP) Labuhanbatu Utara Nomor 18 Tahun 2020 tentang tata cara pembangian, penetapan besaran, penyaluran dan penggunaan Alokasi Dana Desa Kabupaten Labuhanbatu Utara, bahwa setiap Pengelolaan Dana Desa yang termasuk dalam kelompok transfer dikelola dalam APBK (Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung), dalam hasil penelitian yang dilakukan peneliti pelaksanaan kegiatan yang tertuang dalam APBK melalui hasil musyawarah desa dalam pelaksanaan pembangunan fisik desa berupa pengerasan jalan pitrun, pengerasan rawat beton & gotong royong di 9 (Sembilan) dusun dan dua penggunaan dana dari kegiatan ini bersumber dari Dana Desa yang besumber dari APBN, sedangkan untuk penggunaan dananya adalah untuk bidang penyelenggaraan pemerintahan desa dalam hal ini termasuk operasional perkantoran belanja barang dan jasa, belanja modal berupa pengadaan komputer, laptop dan juga printer, operasional MTK, operasional PKK, operasional LPM, penyelenggaraan musyawarah desa, penyelenggaraan perencanaan desa (Penyusunan RPJM Desa, RKP Desa dan APBK), Penghasilan Tetap Dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa berupa pembangunan Posyandu. Dalam hasil penelitian bisa dilihat diatas bahwa dalam rencana kerja pemerintah desa pada pemberdayaan masyarakat program yang ada itu masih minim hanya berupa pengembangan Posyandu dengan penggunaan dana sebesar Rp.20.350.000-, jika melihat tujuan dari penggunaan Alokasi Dana Desa tentu masih belum bisa dikatakan optimal sesuai dengan kepuasan masyarakat.

Hal ini terlihat dari pernyataan yang dikemukakan oleh Bapak Asriwiyanto S.Pd selaku Anggota BPD Desa Teluk Piai pada saat peneliti wawancara, berikut pernyataannya: *“Kebanyakan penggunaan ADD di pergunakan hanya untuk keperluan operasional pemerintah dan tunjangan serta pembelian alat-alat kantor yang tidak memiliki dampak signifikan dalam meningkatkan pembangunan”*<sup>7</sup>. Hal sama juga di kemukakan oleh bapak Ahmad Nasrun Siregar selaku Ketua sekaligus mantan Ketua BPD di Desa Teluk Piai pada saat peneliti wawancara, pernyataannya sebagai berikut: *“Semasa saya menjabat dan sampai saya pensiun penggunaan ADD di Desa Teluk Piai ini pemerintah terlalu banyak mengerluarkan uang untuk biaya operasional yang saya rasa kurang menunjang dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat makanya tak heran masyarakat merasa kurang puas terhadap kinerja aparatur dalam melakukan pengelolaan Alokasi Dana Desa ini”*.<sup>8</sup> Akan tetapi menurut Sekretaris Desa Teluk Piai yaitu Bapak Irhamudin Siregar S.P pada saat peneliti wawancara, berikut pernyataannya: *“Pemerintah desa dalam melakukan belanja operasional tentu sudah sangat membutuhkan hal itu, misalnya dalam pembelian alat kantor seperti komputer dan print, itu sangat diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan misalnya dalam pembuatan surat-surat, dan juga pembelian kursi plastik juga sangat dibutuhkan ketika mengadakan rapat dan acara-acara penting lainnya”*.

Berlanjut ke pernyataan Bapak Sangkot Tanjung selaku masyarakat di Desa Teluk Piai pada saat peneliti wawancara, berikut pernyataannya: *“Walaupun untuk program pemberdayaan masyarakat masih kurang optimal akan tetapi hal ini masih lebih baik dari tahun 2018 lalu perlu di ketahui bahwa di tahun 2018 program mengenai pemberdayaan masyarakat tidak pernah terusulkan hanya pada tahun ini program pisa bidang pemberdayaan masyarakat dibuat meskipun belum terlaksana dengan optimal”*.<sup>9</sup> Lanjut ke hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan Ketua Tim Penggerak PKK Desa Teluk Piai yaitu Ibu Hafni Sitorus, ketika peneliti menanyakan mengenai kegiatan Posyandu apakah berjalan dengan baik atau tidak, berikut pernyataannya: *“Ya, dalam setiap kegiatan Posyandu selalu berjalan dengan baik, hal ini juga menjadi suatu kepedulian oleh pemerintah untuk kesehatan ibu dan juga*

---

<sup>7</sup> Asriwiyanto S.Pd. 2 Januari 2022. *“Kantor Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara”*.

<sup>8</sup> Ahmad Nasrun Siregar. 12 Januari 2022. *“Kantor Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara”*.

<sup>9</sup> Sangkot Tanjung. 2 Januari 2021. *“Kantor Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara”*.

*generasi penerus di desa teluk pi ai ini”*.<sup>10</sup> Hal serupa juga dikatakan oleh ibu Marwiyah Siregar selaku masyarakat di Desa Teluk Piai, berikut pernyataannya: *“Dalam melaksanakan program posyandu pemerintah desa sudah melaksanakan dengan baik, hal ini bisa mempermudah kami sebagai ibu-ibu kami tidak perlu lagi jauh-jauh pergi ke puskesmas untuk melakukan posyandu karena Posyandu sudah diadakan di balai desa”*.<sup>11</sup>

Selanjutnya menurut Bapak Azis selaku operator komputer di Desa Teluk Piai ketika ditanya apakah pemerintah desa benar-benar melaksanakan pengadaan barang berupa laptop dan komputer, pertanyaannya sebagai berikut: *“Pemerintah desa pada tahun 2018 benar-benar telah mengadakan pembelian berupa 1 unit laptop, 1 unit komputer dan 1 unit printer laptop yang ada sekarang sudah saya gunakan untuk membantu keperluan desa dalam hal ini saya yang bertanggungjawab terhadap laptop ini, sedangkan untuk computer dan printer sudah dipasang di balai desa, karena computer lama yang ada di desa sudah tidak bisa di gunakan kembali”*.<sup>12</sup>

Jika melihat hasil wawancara di atas penulis dapat menyimpulkan meskipun pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa dapat berjalan dengan baik akan tetapi masih ada sedikit kekurangan terkait optimalisasi Alokasi Dana Desa dana yang sedianya 70% untuk pemberdayaan masyarakat masih belum digunakan dengan optimal. Hal ini lah yang harus menjadi perhatian bagi Pemerintah Desa dan juga masyarakat memang pembangunan fisik itu penting tetapi juga harus disertai dengan pemberdayaan masyarakat.

Terkait optimalisasi pengelolaan Dana Desa untuk kepuasan masyarakat dalam meningkatkan pembangunan desa dengan menggunakan teori dari Winardi mengenai optimalisasi yang dilihat dari sudut usaha yaitu usaha untuk memaksimalkan suatu kegiatan maka dalam hasil wawancara peneliti dengan Kepala Desa Teluk Piai ketika ditanya usaha apa yang akan dilaksanakan pemerintah Desa Teluk Piai dalam mengoptimalkan pemberdayaan dan kepuasan masyarakat jawaban beliau adalah sebagai berikut: *“Nanti untuk kedepannya kami akan coba menggali lagi apa keinginan masyarakat mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan agar masyarakat juga ikut aktif dalam memberikan masukan pembangunan bagi pemerintah desa agar*

---

<sup>10</sup> Hafni Sitorus. 2 Januari 2021, “Kantor Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara”.

<sup>11</sup> Marwiyah Siregar. 12 Januari 2022. “Kantor Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara”.

<sup>12</sup> Azis. 3 Januari 2022. “Kantor Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara”.

*tercipta pemerataan pembangunan yang menyentuh seluruh unsur masyarakat”.*  
<sup>13</sup>Selanjutnya ditambahkan juga oleh Seketaris Desa Teluk Piai Bapak Irhamuddin Siregar S.P pernyataannya dalam wawancara sebagai berikut: *“Untuk kedepannya pemerintah akan lebih mengedepankan pengadaan alat penunjang dalam pertanian, karena mengingat mayoritas pekerjaan dari masyarakat desa adalah petani, dan juga pemerintah akan mengadakan pelatihan-pelatihan tim penggerak PKK, dan memberikan modal usaha bagi masyarakat yang ingin membuka suatu usaha”.*<sup>14</sup>

Dalam rangka Optimalisasi Pengelolaan Dana Desa yang akuntabel dan transparan maka kepala desa sebagai pemegang kekuasaan penyelenggaraan keuangan desa wajib menyampaikan pertanggungjawabannya pada bupati melalui camat pemerintah desa di dalam menyusun dan dalam menyajikan laporan keuangan harus sesuai prinsip dasar Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yaitu dapat mengukur, mengakui, dan dapat menyajikan secara wajar laporan keuangan. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam pembuatan SPJ pemerintah desa sudah melaksanakan sesuai dengan format yang ada dan sesuai tahapan-tahapan yang berlaku. Hal ini sesuai dengan apa yang di katakan oleh Kepala Desa Teluk Piai dalam wawancara sebagai berikut:

Dalam menyusun SPJ pemerintah selalu menyusun sesuai dengan format yang ada dan yang berlaku”.<sup>15</sup> Hal sama juga di katakan oleh bendahara desa teluk piai dalam wawancara, berikut pernyataannya: *“Dalam membuat SPJ selain mengikuti format yang ada tidak lupa juga melampirkan semua lampiran yang diperlukan.*<sup>16</sup>

Terkait tentang pengoptimalan Alokasi Dana Desa untuk kepuasan masyarakat dan dalam meningkatkan pembangunan desa. Dari hasil penelitian dan pendapat dari berbagai sumber menunjukkan bahwa dalam tahapan perencanaan pemerintah desa sudah melaksanakan dengan mengikuti tahapan yang telah ditetapkan yaitu dengan melaksanakan Musrembang Desa. Walaupun dalam tahapannya sudah berjalan dengan

---

<sup>13</sup> Khairuddin. 3 Januari 2022. *“Kantor Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara”.*

<sup>14</sup> Irhamuddin Siregar. 3 Januari 2022. *“Kantor Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara”.*

<sup>15</sup> Khairuddin. 3 Januari 2022. *“Kantor Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara”.*

<sup>16</sup> Syukron DTM. 3 Januari 2022. *“Kantor Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara”.*

baik akan tetapi hanya sekedar untuk memenuhi ketentuan belum terlalu mencakup pemenuhan kebutuhan.

Dalam hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa menunjukkan kurang optimalnya hasil Musrembang Desa yang ada hal ini dikarenakan kurangnya masukan dari masyarakat mengenai program-program yang diinginkan masyarakat untuk dapat terlaksana, dalam pembuatan program kebanyakan hanya usulan dari pemerintah desa padahal tujuan dari pelaksanaan musrembang adalah agar masyarakat dapat dengan bebas menyuarakan keinginan dan pendapat dalam hal memberikan masukan tentang pembangunan agar setiap kegiatan yang ada benar-benar sesuai dengan harapan dari masyarakat.

Selanjutnya tahap pelaksanaan jika dilihat dari hasil penelitian yang ada menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah desa bersama dengan masyarakat, meskipun pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sudah mulai ada peningkatan akan tetapi peningkatan yang ada masih sangat sedikit belum mencakup keseluruhan kebutuhan dan kepuasan masyarakat terkait dengan pengoptimalan pengelolaan alokasi Dana Desa dilihat dari segi perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban, menurut Kepala Desa ada berbagai usaha yang akan dilakukan yaitu dengan melihat hal-hal yang di perlukan masyarakat Desa Teluk Piai.

## **2. Tahap Pengalokasian dan Pelaporan Dana Desa Di Desa Teluk Piai, Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara**

Selanjutnya selain tahap perencanaan dan pengelolaan membuat laporan pengalokasian dan pelaporan adalah salah satu prinsip pengelolaan Alokasi Dana Desa yaitu harus evaluasi kegiatan dengan masyarakat. Hal ini mengidentifikasi bahwa dalam setiap tahapan pelaporan pengalokasian hendaknya pemerintah desa tidak hanya melaksanakan pertanggungjawaban kepada pemerintah pusat dan daerah saja tetapi pemerintah desa tidak boleh melupakan masyarakat, masyarakat juga membutuhkan informasi dan ikut mengevaluasi setiap kegiatan pembangunan yang sudah terlaksana di desa. Akan tetapi hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Teluk Piai tidak melaksanakan evaluasi bersama dengan masyarakat, hal ini terlihat dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat yang ada di Desa Teluk Piai, wawancara berikut dengan bapak Abduh S.Ag selaku tokoh masyarakat di Desa Teluk Piai: *“Selama ini saya tidak pernah diundang untuk melaksanakan rapat evaluasi sehingga*

*saya tidak pernah tau apakah ada permasalahan atau tidak dalam Pengelolaan Dana Desa*”<sup>17</sup> Hal serupa juga di katakan oleh bapak Rusdi selaku masyarakat: *“Yang saya tau pemerintah hanya melaksanakan pertanggungjawaban kepada pemerintah daerah tetapi kepada masyarakat tidak pernah tau”*.<sup>18</sup>

Penulis menyimpulkan dari wawancara di atas yaitu karena kurangnya keterbukaan informasi seperti ini seringkali membuat masyarakat bertanya-bertanya apakah dalam pelaksanaannya pemerintah desa mengalami masalah atau tidak. Dan ketika ditanya usaha apa dari pemerintah dalam mengatasi hal ini berikut pernyataan dari Bendahara Desa Teluk Piai: *“Untuk mengatasi hal ini tentu juga harus ada kerjasama dengan masyarakat desa meskipun pemerintah sudah memberikan informasi mengenai pelaksanaan evaluasi tetapi jika masyarakat tidak hadir akan percuma”*.<sup>19</sup>

### **3. Pertanggungjawaban Aparatur Pemerintah Desa Dalam Melakukan Penyaluran Dana Desa Di Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhanbatu Utara.**

Pada tahap pertanggungjawaban dapat dilihat dari hasil penelitian bahwa dalam tahapan penyusunan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pemerintah desa sudah melaksanakan sesuai dengan format dan tahapan yang ada, dalam pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pemerintah desa teluk piai juga tidak pernah terlambat dalam memsukkan laporan, sehingga SPJ yang dibuat oleh pemerintah Desa Teluk Piai bisa menjadi contoh/acuan untuk desa-desa yang lain.

Dalam membuat laporan pertanggungjawaban Pemerintah Desa Teluk Piai sudah melaksanakan sesuai dengan tahapan yang berlaku dan dalam pembuatannya juga selalu tepat waktu tidak pernah ada keterlambatan dalam pemasukan laporan sehingga Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) yang di buat oleh Desa Teluk Piai menjadi contoh bagi desa-desa yang lain. Hal ini senada dengan yang dikatakan oleh Sekretaris Desa Teluk Piai, berikut pernyataannya dalam wawancara dengan peneliti:

---

<sup>17</sup> Abduh S.Ag. 4 januari 2022. *“Kantor Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara”*.

<sup>18</sup> Rusdi. 4 Januari 2022. *“Kantor Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara”*.

<sup>19</sup> Syukron DTM. 3 januari 2022. *“Kantor Desa Teluk Piai Kecamatan Kualuh Hilir Kabupaten Labuhan Batu Utara”*.

Dalam pembuatan SPJ Desa Teluk Piai tidak pernah terlambat dan selalu tepat waktu, bahkan banyak kepala desa dari desa lain yang melihat dan menjadikan contoh dalam pembuatan SPJ desa mereka.

Kesimpulan dari wawancara di atas yaitu meskipun pada tahap pembuatan pertanggungjawaban sudah berjalan dengan baik tetapi dalam proses evaluasi kegiatan pemerintah tidak mempertanggungjawabkan didepan masyarakat sehingga masyarakat tidak tau apakah dalam pelaksanaan kegiatan sudah berjalan dengan baik atau tidak. Padahal masyarakat juga menjadi salah satu unsur yang mengawasi jalannya suatu kegiatan dari awal sampai akhir dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUMATERA UTARA MEDAN